



PROCEEDING
KONFERENSI NASIONAL

**KOMUNIKASI
POLITIK**



Proceeding

SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI POLITIK

Copyright © Desember 2014

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.

Ukuran: 16,5x24 cm; Halaman: 518

ISBN: 978 - 602 - 1642 - 39 - 9

Ditulis oleh:

Call for Paper Konferensi Komunikasi Politik

Diterbitkan oleh:

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya

Dicetak oleh:

Penerbit Intrans

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro no. 42 Malang, Jawa Timur

Telp. 0341-573650, 7079957 Fax. 0341-588010

Email: redaksi.intrans@gmail.com

intrans_malang@yahoo.com

KOMUNIKASI POLITIK DAN DEMOKRASI ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILU 2014

Sinta Paramita, SIP., M.A.

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara

Jl. S. Parman No. 1 Jakarta Barat

sintap@fikom.untar.ac.id

Abstrak

Kajian kritis ini akan memperbincangkan tentang fenomena komunikasi politik etnis Tionghoa dalam meramaikan Pemilu 2014. Tionghoa merupakan sebutan bagi orang-orang yang berasal dari suku Tiongkok di Indonesia. Seiring dengan berjalannya proses dinamika politik di Indonesia, menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan etnis Tionghoa. Diskriminasi yang dirasakan etnis Tionghoa dahulu memaksa mereka menjadi golongan masyarakat yang termaginalkan. Diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa seperti mulai dari tuduhan sebagai pendiri komunis pada masa Orde Lama, kemudian pelarangan menggunakan nama lokal, tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemerintahan pada rezim Orde Baru, hingga puncaknya kerusuhan 9 Mei 1998 yang menjadi catatan kelam pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) bagi bangsa Indonesia.

Perjalanan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa tersebut, tentunya akan merubah pola hidup etnis Tionghoa dalam bersosialisasi dengan masyarakat mayoritas. Kebebasan HAM dan demokrasi yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia, membawa kesetaraan yang baik bagi etnis Tionghoa. Demokrasi yang terbentuk, akan mengurangi konflik antar etnis di Indonesia. Demokrasi berimbang kepada perkembangnya perekonomian di Indonesia

yang tidak terlepas dari keikutsertaan etnis Tionghoa dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Saat ini masyarakat Etnis Tionghoa mulai bergairah meramaikan proses demokrasi di Indonesia. Keikutsertaan dalam pemilu 2014 dapat dilihat dari munculnya Calon Legislatif (caleg) dari etnis Tionghoa. Kesadaran partai politik dalam melihat kader etnis Tionghoa yang berkualitas justru ikut mendukung kebebasan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal dengan "Ahok" yang mendampingi Jokowi dalam memerintah DKI Jakarta, dinilai mempunyai kinerja yang baik oleh berbagai aktor politik dalam menjalankan tugasnya. Ketegasan Ahok dalam memimpin DKI Jakarta dinilai membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat DKI Jakarta. Profesionalitas dan ketegasan Ahok secara tidak langsung memicu masyarakat etnis Tionghoa untuk menunjukkan kemampuan dan komitmennya dalam membangun bangsa Indonesia.

Hasil dari pengamatan kritis atas komunikasi politik etnis Tionghoa dalam pemilu 2014, menunjukan bahwa etnis Tionghoa dalam lingkup komunikasi politik berperan penting dalam memberikan kontribusi pesan politik dalam demokrasi kepada seluruh masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat mayoritas masih ada yang memandang etnis Tionghoa secara stereotipe dan tidak percaya atas kemampuan memerintah etnis Tionghoa. Dalam ukuran kebebasan demokrasi yang baik, setidaknya Indonesia dan pemerintah telah menjamin kesamaan hak demokrasi dalam Pemilu 2014 untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Demokrasi, Etnis Tionghoa, Pemilu 2014

Pendahuluan

Fokus dari kajian kritis ini adalah mencoba melihat bagaimana komunikasi politik, dan demokrasi etnis Tiong Hua dalam Pemilu 2014. Oleh sebab itu dibutuhkan landasan teori yang tepat untuk mendekati fenomena yang akan diamati. Pada bagian pertama pada tulisan ini akan menjelaskan mengenai komunikasi politik. Seluk beluk secara singkat mengenai definisi lengkap komunikasi politik dan proses komunikasi politik dalam Pemilu 2014. Kedua tulisan ini akan menceritakan masyarakat etnis Tionghoa dan demokrasi. Pembahasan kedua akan diawali dengan sejarah singkat kedatangan etnis Tiong Hua, kemudian masalah yang timbul yang dialami masyarakat etnis Tionghoa dalam demokrasi. Ketiga, landasan teori ini

akan membahas tentang fenomena keikutsertaan masyarakat etnis Tionghoa dalam pesta demokrasi Indonesia 2014.

Komunikasi Politik dan Pemilu 2014

Menurut Gabriel Almond Komunikasi politik merupakan salah satu dari fungsi input sistem politik yang menyebabkan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat pemrosesan sistem politik dan hasil pemrosesan itu yang tersimpul dalam fungsi *output* dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang menjadi *feedback* sistem politik. Lebih lanjut Gabriel Almond membagi tiga elemen dalam komunikasi politik menjadi mikro, messo, dan makro. Konteks mikro dapat dilihat pada ranah *citizens* yang merupakan keterlibatan individu yang mempunyai aspirasi atau tujuan politik untuk kepentingan tertentu. Sebagai contoh aktor politik yang mempunyai kepentingan politik, berusaha untuk mencari strategi untuk meraih kesuksesan dalam pencapaian kepentingannya. Kemudian konteks messo dapat dilihat dari ranah organisasi politik seperti partai politik.

Organisasi politik itu sendiri merupakan sebuah institusi yang membawa pengaruh kepada pengambilan kebijakan politik. Organisasi politik berfungsi sebagai mediator yang akan memfasilitasi aktor politik yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memberikan dukungan kepada. Aktor politik yang diusung dan nantinya akan menyampaikan dukungan tersebut berupa tuntutan kepada sistem sosial. Terakhir konteks makro dapat dilihat dari ranah sistem sosial politik. Konteks sosial politik mempunyai kekuatan untuk membentuk atau menghasilkan sebuah kebijakan. Pada sistem sosial itu sendiri terdapat suprastruktural, yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Aktor politik menyampaikan kepentingan politik melalui organisasi politik demi mendapatkan dukungan yang nantinya berupa tuntutannya kepada sistem sosial politik. Sistem politik merupakan inti dari proses munculnya suatu kebijakan yang akan digunakan untuk kepentingan bersama. Seperti yang dikatakan Denton dan Woordward yang mengatakan bahwa, komunikasi politik merupakan diskusi tentang *public resources revenue official authority* (mereka yang diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan, keputusan legislatif dan eksekutif), dan *official sanction* (penghargaan atau hukuman oleh Negara). Pandangan Deton and Woordward ditanggapi oleh Brian McNair hanya sebagai sebuah retorika politik verbal dan tulisan. Kemudian, Menurut Doris Graber berpandangan bahwa komunikasi politik merupakan paralinguistik seperti bahasa tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan protes.

Pandangan Doris Graber serta merta mendapat dukungan McNair bahwa, pakaian apa yang digunakan, gaya rambut, tata rias, dan logo yang ditujukan untuk membentuk *image* politik termasuk dalam komunikasi politik (McNair, 2003: 4). Sedangkan menurut McNair sendiri komunikasi politik terbagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, komunikasi politik merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus atau aktor politik semata-mata hanya untuk mencapai tujuannya tertentu. Kedua, komunikasi politik ditujukan kepada aktor politik oleh non politikus seperti pemilih dan kolumnis. Ketiga, aktor politik dan kegiatan meraka, merupakan isi yang dimuat berita, editorial, dan berbagai bentuk media.

Dari pandangan McNair dihasilkan tiga elemen penting dalam komunikasi politik yaitu: organisasi politik, media, dan *citizens*. Elemen pertama adalah organisasi politik, merupakan sebuah institusi yang membawa pengaruh kepada pengambilan kebijakan politik. Organisasi politik itu sendiri terdiri dari lima komponen yaitu: partai politik, organisasi *public* non partai, kelompok penekan, organisasi teroris, dan pemerintah. Kelima komponen tersebut merupakan wadah politik untuk, menampung semua aspirasi aktor politik sesuai dengan kepentingannya. Partai politik berkepentingan untuk agregasi kelompok yang mempunyai kesamaan ideologi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi *public* non-partai hampir sama dengan partai politik mempunyai kepentingan tetapi tidak menggunakan ideologi sebagai pijakan. Organisasi teroris mempunyai kepentingan yang berwujud radikal dan membahayakan orang lain dengan cara meneror, menyandra, dan lain-lain demi mencapai tujuannya.

Pemerintah berkepentingan menjalankan fungsi sebagai pemerintah. Elemen kedua komunikasi politik menurut McNair adalah media. Selain menjalankan fungsi media sebagai pengawasan, penghubung, penransferan budaya, dan hiburan. Media juga berfungsi sebagai alat yang digunakan aktor politik untuk menyampaikan kepentingan dan tujuan kepada organisasi politik dan *citizens* bisa berupa reportase, komentar, analisis, dan editorial. Juga terjadi hubungan timbal balik berupa *appeals*, *programmes*, *adv*, and *public relation*. Elemen terakhir komunikasi politik menurut McNair adalah *citizens*. *Citizens* artinya sebagai keterlibatan individu yang mempunyai aspirasi atau tujuan politik, yang akan disalurkan kepada organisasi politik tertentu, demi bendaapatkan kebijakan tertentu. Kemudian Doris Graber menambahkan bahwa komunikasi politik tidak hanya sebuah retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik misalnya boikot, protes, dan untuk rasa (Cangara, 2011: 30).

Dari kumpulan definisi komunikasi politik di atas bisa dirumuskan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaikan pesan-pesan

politik dari komunikator baik secara individu maupun kelompok kepada komunitas yang berdampak kepada sistem sosial atau khalayak masyarakat. Menurut Cagara Unsur-unsur dalam komunikasi politik meliputi komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan pengaruh atau efek komunikasi politik (2011: 31-32). Komunikator politik dapat didefinisikan sebagai aktor politik atau partai politik yang mengetahui informasi tentang politik atau organisasi-organisasi yang bisa mempengaruhi sistem politik. Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik secara verbal dan non verbal yang isinya mengandung pesan politik.

Kemudian saluran atau media politik merupakan alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Sasaran atau target politik merupakan khalayak yang diharapkan dapat mendukung kebijakan atau informasi politik yang disampaikan komunikator politik. Terakhir adalah pengaruh atau efek komunikasi diharapkan terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik untuk memilih (*vote*) para aktor dan partai politik dalam pemilu.

Salah satu unsur dalam komunikasi politik yang menjadi fokus penelitian ini adalah saluran atau media politik. Televisi sebagai media massa tidak hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Hal tersebut bisa terjadi karena sifat media massa yang dapat mengangkut pesan-pesan secara masif dan luas kepada khalayak atau publik yang jauh, beragam, dan terpancar luas. Aspek yang sangat menonjol dengan media massa terkait dengan politik adalah fungsi media massa dalam kehidupan politik. Karena sifatnya yang sentral dalam politik, media massa memiliki fungsi penting dan strategis. Komunikasi politik dapat didefinisikan dengan berbagai macam sudut pandang.

Politik Etnis Tionghoa dan Demokrasi

“Di Indonesia, rasialisme negara punya sejarah yang lebih panjang ketimbang Sejarah Republik. Bahkan lebih tua ketimbang entitas yang disebut negara”

(Pramoedya Ananta Toer, 1998: 33)

Sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia banyak meninggalkan polemik dalam kehidupan sosial. Menurut Marisa (2004: 1) mengatakan bahwa sejak masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, kehadiran masyarakat etnis Tionghoa seringkali disikapi acuh tak acuh oleh masyarakat Pribumi dan Pemerintah. Angka terbaru yang menunjukkan prosentase etnis Tionghoa terhadap populasi di Indonesia pertama kalinya dibuat

pada 2000. Menurut hasil survei Leo Suryadinata dalam buku *Indonesia's Populations* menunjukkan bahwa etnis Tionghoa hanya mencapai 1,5 persen dari total populasi (2003: 78-101). Data survei yang terlampir sesungguhnya tidak mewakili keseluruhan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Purdey lebih lanjut mengatakan data survei yang didapat pada tahun 1930 sesungguhnya tidak mewakili semua etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena sebanyak 25 persen etnis Tionghoa tidak mengaku dirinya adalah etnis Tionghoa saat dilakukan survei tersebut (2003: 3). Purdey menjelaskan 25 persen etnis Tionghoa tidak mengaku dirinya adalah etnis Tionghoa, Sebab oleh trauma yang mereka alami pada saat Mei 1998.

Melihat dinamika masyarakat etnis Tionghoa sebagai bagian dari kenyataan kebhinekaan masyarakat Indonesia ini, mengharuskan suatu pemahaman mendalam mengenai sejarah dan peranan golongan minoritas dalam masyarakat luas. Nasionalisme Indonesia merangkul pluralisme agama melalui pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), yang oleh Soekarno dibuat untuk meletakan fondasi nilai-nilai dari bidaunya politik Indonesia. Warga Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan menganut salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara. Islam, Budhha, Hindu, Katolik, dan Protestan. Menurut Suryadinata (2003: 105) Islam adalah agama terbesar di Indonesia yang mencangkup 88 persen dari total populasi, diikuti kemudian oleh Kristiani 9 persen, Hindu 2 persen, Buddha 0,8 persen, dan lainnya 0,2 persen. Akan tetapi tidak disediakannya pilihan lain seperti Konghucu pada saat sensus tahun 2000 menunjukkan bahwa sebagai individu yang masuk dalam agama lain-lain mengisi data palsu.

Misalnya, seorang warga etnis Tionghoa yang juga merupakan anggota Konghucu bisa saja mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Kriten untuk kepentingan sensus. Meskipun data sensus tidak menyediakan spesifikasi dari agama yang dianut oleh masyarakat Tionghoa. Hasil dari sensus tersebut memungkinkan kita untuk membandingkan etnis Tionghoa berdasarkan wilayah provinsi dari pengikut Kriten dan Budhha yang merupakan bagian dari Konghucu. Kolerasi yang terbentuk mendukung kesan bahwa etnis Tionghoa kebanyakan menganut agama di luar Islam (Geertz dalam Pudrey, 2003: 4).

Tidak adanya agama Konghucu atau agama lain menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang dialami keturunan etnis Tionghoa dalam berwarganegara. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid melepas kekangan budaya dengan mencabut Inpres Nomor 14/1967 yang melarang pementasan kebudayaan Tionghoa. Keterlibatan keturunan Tionghoa dalam politik di Indonesia dimulai terlihat. Hal tersebut ditunjukkan dari pengangkatan ekonom Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi. Pada gene-

rasi selanjutnya, Presiden Megawati juga menunjukkan politik antidiskriminasi dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional pada 2012.

Masuk di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Marie Elka Pangestu mencatat sejarah sebagai menteri perempuan keturunan Tionghoa pertama di kabinet. Pada 2004 beliau dipercaya untuk memimpin pos kementerian perdagangan sebelum akhirnya diaulat menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2011 lalu. SBY juga mengeluarkan peraturan untuk mengganti semua istilah etnis Cina menjadi Tionghoa dan sebutan negara Cina menjadi Tiongkok. (bbc.co.uk)

Penduduk keturunan Tionghoa di Indonesia pada umumnya lebih memilih untuk memasuki dunia perdagangan dan perekonomian dibandingkan aktivitas politik. Kegiatan politik lebih dihindari karena adanya pengalaman masa lalu saat order baru yang banyak dimanfaatkan sebagai "ATM" atau hanya untuk penyumbang dana tanpa disertakan dalam ikut campur politik yang sebenarnya.

Namun, politik Indonesia saat ini sudah cukup banyak tokoh keturunan Tionghoa yang turut berperan di dalamnya bahkan memiliki jabatan atau posisi yang cukup penting. Sebagai contoh adalah Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok. Beliau merupakan mantan wagub DKI Jakarta yang naik pangkat menjadi Gubernur setelah terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Ahok merupakan seorang keturunan Tionghoa yang mampu maju sebagai salah satu aktivis politik dan menunjukkan kemampuannya dalam bidang itu. Contoh lain yang dapat kita lihat adalah pada tokoh Harry Tanoe Soedibjo. Beliau sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari Partai Hanura untuk Pilpres 2014 yang lalu. Memang kemungkinan beliau untuk menjadi presiden kecil, namun itu bukan karena faktor garis keturunan Tionghoa yang dimilikinya. Bahkan selama pemilu berlangsung, sangat sedikit isu miring mengenai hal tersebut.

Meskipun kehidupan politik di Indonesia masih mayoritas diisi oleh penduduk pribumi, namun perlahan-lahan warga keturunan Tionghoa pun mulai turut berperan dalam masalah politik. Keberhasilan antirasisme mulai terlihat dengan jelas. Memang, saat ini belum bisa dikatakan bahwa 100% masyarakat Indonesia dapat membaur dengan baik antara pribumi dengan keturunan Tionghoa. Namun, bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, terutama kasus Mei 1998, maka jelas terlihat bahwa kehidupan dan peran masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia jauh lebih diakui dan diterima oleh masyarakat.

Tidak hanya pada tokoh-tokoh yang dikenal, dalam pemilu legislatif 2014 yang lalu, saat penulis menggunakan hak pilih dalam pemilu 2014,

penulis menemukan bahwa ada beberapa calon yang merupakan keturunan Tionghoa. Hal ini membuktikan adanya keterlibatan dan keikutsertaan keturunan Tionghoa dalam kehidupan politik.

Namun, bagi kaum pribumi, ada yang menilai bahwa keturunan Tionghoa yang turut serta dalam aktifitas politik hanya untuk keuntungan bisnisnya atau perusahaan saja. Isu ini yang sangat disayangkan karena dapat memicu terulangnya kembali peristiwa rasisme yang terjadi pada masa Orde Baru. Padahal menurut ideologi yang dianut Indonesia, yaitu Pancasila, menjunjung tinggi nilai keberagaman yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kaum keturunan Tionghoa maupun pribumi sama-sama merupakan warga Indonesia yang menurut hukum memiliki kedudukan yang sama. Meskipun ideologi Pancasila sudah cukup lama diterapkan namun bauran antara kaum Tionghoa dengan Pribumi masih perlu dipertanyakan.

Metode Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian ini adalah mencoba melihat bagaimana komunikasi politik dan demokrasi etnis Tiong Hua dalam Pemilu 2014, maka penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus guna mengamati komunikasi politik yang dilakukan masyarakat etnis Tionghoa dalam Pemilu 2014. Menurut Yin (2008: 2) studi kasus merupakan cara menentukan data yang relevan dan menentukan apa yang seharusnya dikerjakan sehubungan dengan data yang telah terkumpul. Lebih lanjut Yin mengatakan (1996: 18) studi kasus adalah suatu teknik penelitian kualitatif yang memanfaatkan sebanyak mungkin sumber data agar secara sistematis dapat menginvestigasi individu, kelompok, organisasi dan peristiwa. Keuntungan dari studi kasus berupa hasil rinci yang dapat diteliti dan dapat dipakai untuk penelitian lebih lanjut. Dalam banyak hal, teknik ini juga memberi peluang untuk peneliti bergelut dengan berbagai macam bukti seperti dokumen, wawancara, observasi, dan survey. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Metode studi kasus dipilih karena fokus yang diteliti merupakan sebuah prosesi yang sedang berlangsung.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk melihat dan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk melihat dinamika masyarakat etnis Tionghoa dalam Pemilu 2014. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data observasi dan wawancara dari anak muda etnis Tionghoa. Untuk memperoleh data pada saat penelitian dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan teknik wawancara cukup efektif digunakan dalam menggali data untuk memperoleh setiap data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui wawan-

cara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami seseorang atau subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam subjek penelitian

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dari data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif lebih menggambarkan keadaan dan hasil masalah yang diteliti dimana uraian tersebut sedikit diperlukan data yang berwujud angka.

Menurut Moleong (2007:288) proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Inti analisis data kualitatif terletak pada tiga proses yang berkaitan yakni: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikannya dan melihat bagaimana konsep-konsep itu satu dengan lainnya berkaitan. Setelah data-data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah-langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Pemilihan metode ini didasarkan atas kemampuan metode studi kasus dalam menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” dan “bagaimana”. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi politik dan demokrasi etnis Tiong Hua dalam Pemilu.

Ada tiga jenis penelitian studi kasus menurut Yin (1996) yaitu eksploratori, eksplanatori dan deskriptif. Penelitian ini berusaha memaparkan secara rinci dan mendalam (*in-depth*) masyarakat etnis Tionghoa di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tentang komunikasi politik dan demokrasi etnis Tiong Hua dalam Pemilu 2014, untuk tujuan tersebut maka jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi saat ini. Penelitian ini tidak berusaha memprediksi kejadian di masa mendatang. Studi kasus juga berusaha menjawab pertanyaan *how* dan *why* sehingga penelitian ini juga bersifat eksplanatoris dan dapat mengarahkan penggunaan studi kasus terkait persoalan operasional yang hanya bisa dilacak pada waktu-waktu tertentu (Yin, 1996). Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat, membuat kategori perilaku, mengamati gejala,

kemudian mencatatnya. Penelitian ini bukan hanya menjabarkan tetapi juga berusaha memadukan, tidak hanya klasifikasi tetapi juga mengorganisasi. Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini pertama dengan observasi. Penelitian deskriptif juga menurut Wood disebut sebagai penelitian observasional (Rakhmat, 1984) yang berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi. Teknik ini dipakai untuk memperoleh data secara langsung di lapangan dengan memperhatikan penerapan komunikasi kesehatan di masyarakat. Observasi dilakukan guna meningkatkan objektivitas data yang dihasilkan dari teknik wawancara yang terkadang masih memiliki kelemahan.

Kedua dengan melakukan wawancara teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau berhadapan langsung dengan responden (fisik). Hal ini dilakukan mengingat responden yang akan terlibat memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam memahami setiap pertanyaan, sehingga akan berpengaruh pada keakuratan data.

Penemuan dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara dengan rakyat yang berasal dari berbagai macam suku, etnis, dan ras. Sesuai dengan ideologi negara, Pancasila, seharusnya semua rakyat memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang perbedaan tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya sejak Indonesia merdeka hingga jaman Orde Baru masih sangat terlihat diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa. Etnik Tionghoa di Indonesia harus mengalami kesulitan dan kekandasan untuk diterima menjadi warga negara yang legal, menjadi anggota yang sederajat dalam kehidupan politik, sosial, kebudayaan, untuk bisa seiyia sekata bersama-sama dengan etnik lainnya, melebur dan menyatu.

Berbagai politik diskriminatif dari para penguasa, telah membuat orang Tionghoa selama ini bersikap dingin dan tak acuh terhadap politik, dan hanya mengurus urusan mencari nafkah dan berusaha maju berkembang dalam bisnis. Namun, tahun 2012 sepertinya menjadi sebuah tahun sejarah bagi etnis Tionghoa dalam bidang politik. Hal ini dimulai ketika Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan, dimana salah satu calon gubernur dan wakil gubernur yang paling mencolok dan menarik perhatian adalah pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Joko Widodo, saat itu masih merupakan walikota Solo yang mendapat penghargaan sebagai walikota terbaik ketiga di dunia oleh salah satu situs internasional. Tentu hal ini menarik rakyat untuk memilih pasangan ini. Namun, yang lebih mengejut-

kan adalah calon wakil gubernurnya yang merupakan seorang tokoh politik dengan etnis Tionghoa dan beragama Kristen, yaitu Basuki atau yang biasa disebut dengan Ahok.

Akibat pencalonan pasangan Jokowi-Ahok tersebut telah meningkatkan jumlah pemilih beretnis Tionghoa dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 ini. Peneliti Lembaga Survei Indonesia mengakui adanya lonjakan jumlah pemilih beretnis Tionghoa dalam pilkada ini. Diperkirakan terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah pemilih beretnis Tionghoa ini. Pertama, munculnya calon wakil gubernur keturunan Tionghoa, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Simpati berlandaskan etnis memicu warga Jakarta yang beretnis Tionghoa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur. Simpati berlandaskan etnis ini pula yang membuat sebagian besar warga Jakarta beretnis Tionghoa memilih calon dengan nomor urut tiga, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Berdasarkan survei Exit Poll LSI, 100 persen warga Tionghoa memilih Jokowi-Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

Faktor kedua yang menyebabkan naiknya jumlah pemilih beretnis Tionghoa adalah kesadaran untuk mengubah keadaan serta adanya ketidakpuasan terhadap pemimpin *incumbent*. Dengan menggunakan hak pilihnya, warga DKI Jakarta beretnis Tionghoa ini berharap agar calon *incumbent* tak lagi terpilih. Dengan begitu, kehadiran ormas berbasis agama bisa dikendalikan. Faktor ketiga adalah warga Tionghoa berpartisipasi dalam pemilihan gubernur karena tak ingin cagub dari Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini mendapatkan suara. Pada akhirnya, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan yang terbuka dan langsung di DKI Jakarta. Hal ini menjelaskan bahwa kaum Tionghoa betul-betul dapat diterima dan didukung mayoritas pemilih Jakarta. Ini merupakan buah hasil usaha jangka panjang yang tak kenal lelah dari warga negara etnik Tionghoa dalam meraih hak dan kewajiban yang sama dan legal, dan ini adalah hal positif. Dilihat dari sudut keikutsertaan etnik Tionghoa dalam kehidupan politik di negara Indonesia, ini juga merupakan suatu terobosan bersejarah.

Bagi warga negara etnik Tionghoa, hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta tak pelak lagi sangat menggembirakan. Namun, keberhasilan terpilihnya Ahok bukan saja kemenangan pemilih etnik Tionghoa saja, ini merupakan tanda suatu kemajuan reformasi demokratis politik Indonesia. Dengan terpilihnya Ahok, telah memicu warga etnik Tionghoa di Indonesia untuk turut maju dan berperan serta dalam dunia politik. Peran serta etnis Tionghoa dalam politik semakin berkembang sejak 2012. Pada pemilu 2014, semakin banyak caleg yang mengajukan diri dari etnis Tionghoa.

PROCEEDING

Fordeka (Forum Demokrasi Kebangsaan), sebuah organisasi Tionghoa mengkoordinasi sedikitnya 15 caleg untuk pemilu 2014. Forum Demokrasi Kebangsaan (Fordeka) juga melihat kualitas Caleg (calon legislatif atau anggota DPR, DPD) Tionghoa untuk Pemilu 2014 meningkat lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya, tahun 2009 yang lalu. Kemampuan pada Caleg saat bersilaturahmi terlihat mampu mengolah artikulasi politiknya. Tingkat pendidikan Caleg rata-rata juga S2 (strata dua). Sementara secara kuantitas, jumlah Caleg Tionghoa meningkat dua kali lipat dibanding Pemilu sebelumnya. Di sisi lain, Caleg Tionghoa untuk Pemilu 2014 tidak lepas dari fenomena politik politisi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Keberanian dan keberhasilan Ahok di perpolitikan Indonesia semakin mendorong etnis Tionghoa maju sebagai caleg pada Pemilu 2014.



Gambar 1: Caleg FORDEKA (Forum Demokrasi Kebangsaan)



Gambar 2: Dinamika Kampanye Caleg oleh Etnis Tionghoa

Hasil dari observasi mendalam mengatakan bahwa calon legislatif atau caleg etnis Tionghoa menunjukkan bahwa, keikutsertaan mereka dalam Pemilu 2014 semata-mata hanya meramaikan pesta demokrasi bangsa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kebebasan masyarakat etnis Tionghoa saat ini merupakan buah dari perjuangan masyarakat etnis Tionghoa dari diskriminasi yang mereka alami sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Selain itu kampanye politik yang disampaikan oleh caleg etnis Tionghoa adalah menyerukan kembali bahwa sudah tidak ada lagi diskriminasi dan penyetaraan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Caleg etnis Tionghoa berjuang menyakinkan masyarakat etnis Tionghoa baik di Jakarta Barat maupun Jakarta Utara untuk percaya dan memilih caleg ter-sebut dalam Pemilu 2014. Selain itu Ahok sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi

inspirasi dan penyemangat caleg etnis Tionghoa. Mereka berpendapat bahwa Ahok merupakan representasi masyarakat etnis Tionghoa yang mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan. Ahok adalah contoh nyata bahwa caleg etnis Tingoho dalam memerintah.

Temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah ketika peneliti melakukan observasi mendalam kepada masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Mayarakat etnis Tionghoa di dua wilayah tersebut mengatakan bahwa mereka tidak terlalu tertarik untuk memilih caleg dari etnis Tionghoa. Masyarakat etnis tionghoa di Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengatakan bahwa berpolitik dalam pemerintahan bukan karakter dari masyarakat etnis Tionghoa. Mereka juga berpendapat bahwa masya-rakat etnis Tionghoa lebih baik mengeluti bisnis dari ada perpolitik. Selain itu mereka juga tidak percaya terhadap kualitas caleg etnis Tionghoa yang muncul dalam pemilu 2014. Masyarakat etnis Tionghoa lebi memilih caleg yang lain ketimbang caleg dari etnis Tionghoa. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut bukan karakter dari masyarakat etnis Tionghoa. Namun demikian, masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta Barat dan Jakarta Utara berpendapat bahwa munculnya caleg etnis Tionghoa menggembirakan untuk mereka dan hal tersebut merupakan pembuktian bahwa tidak ada diskriminasi terhadap etnis di wilayah DKI Jakarta.

Masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengatakan Ahok merupakan sosok yang paling berperan dalam citra masyarakat etnis Tionghoa saat ini. Namun demikian, yang menarik adalah ketikan masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta Barat dan Jakarta Utara merasa bahwa Ahok menjadi tenar karena Ahok dipasangkan dengan Jokowi. Masyarakat etnis Tionghoa di JakartaBarat dan Jakarta Utara membandingkan Ahok dan Hari Tanoesudibyo. Mereka berpendapat Hari Tanoesudibyo bukan merupakan sosok yang tepat dalam berpolitik. Ketidak konsistennan Hari Tanoesudibyo dalam mendukung partai politik menjadi tolok ukur masyarakat etnis Tionghoa tidak memilih partai yang diusung Hari Tanoesudibyo. Mereka perbendapat Hari Tanoesudibyo merupakan sosok yang sesuai dengan karakter etnis Tionghoa yaitu bisnis bukan berpolitik.

Simpulan

Komunikasi politik yang disampaikan oleh caleg etnis Tionghoa adalah menyampaikan pesan bahwa tidak ada lagi diskriminasi yang dialami masyarakat etnis Tionghoa dan penyetaraan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia Selain itu caleg etnis Tionghoa menunjukan bahwa masyarakat etnis Tionghoa mampu dalam menjalankan pemerintahan khususnya DKI Jakarta. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta mendapat dukungan penuh dari masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta Barat

dan Jakarta Utara. Mereka berpendapat bahwa masyarakat etnis Tionghoa tidak tepat berada di ranah politik. Mereka lebih tepat berada di ranah bisnis. Hal tersebut merupakan buah dari diskriminasi yang dialami masyarakat etnis Tionghoa. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah dahulu membuat masyarakat etnis Tionghoa lebih fokus kepada bisnis.

Kehadiran caleg etnis Tionghoa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia mulai terimplementasikan. Namun demikian, dalam mendapatkan kesuksesan caleg etnis Tionghoa dalam Pemilu 2014 menjadi tugas rumah yang panjang. Karena masyarakat etnis Tionghoa pun belum percaya penuh atas kualitas dan caleg etnis Tionghoa.

Daftar Pustaka

- Cagara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- McNair, Brain. 2003. *An Introduction to Political Communication Third edition*. London and New York: Routledge.
- Mohamad, G. 1998. *Sebuah Catatan Lain dalam Koakiau di Indonesia Pramoedya Ananta Toer*. Jakarta: Garba Budaya.
- Purdey, Jemma. 2013. *Kekerasan Anti-Tionghoa di Indonesia 1996-1999*. Dempasar: Pustaka Larasan.
- Rahmat, Jalaluddin. 2005. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Suryadinata, Leo. 2003. *Indonesian's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute od Southeast Asian Studies.
- Yin, K. Robert. 2006. *Studi Kasus; Metode dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- "Kualitas, Kuantitas Caleg Tionghoa Meningkat pada Pemilu 2014". Data di akses pada 29 September2014. Data terarsib di:
<http://www.indonesiamedia.com/2014/03/30/kualitas-kuantitas-caleg-tionghoa-meningkat-pada-pemilu-2014/>
- Ming, Yin Liang. 2014. *Jalan Menuju Persamaan Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan Etnik Tionghoa Indonesia*. Data di akses pada 29 September2014. Data terarsib di:
<http://www.nabilfoundation.org/artikel/4/jalan-menuju-persamaan-hak-dan-kewajiban-kewarganegaraan-etnik-tionghoa-indonesia>

PROCEEDING

PROCEEDING

ISBN: 978-602-1642-39-4



9 78602 1642399